UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Beyond Formal and Informal Welfare: Street-Level Bureaucracy and Hybrid Distribution in a Rural Context: Case in Kulon Progo, Yogyakarta
Ahmad Abdurrohman, Tauchid Komara Yuda, S.Sos., MDP., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Teori rezim kesejahteraan klasik cenderung memandang praktik informal sebagai mekanisme perlindungan sosial sekunder dibandingkan dengan perlindungan sosial formal berbasis negara. Namun, implementasi kesejahteraan di negara-negara berkembang seringkali menunjukkan hubungan yang lebih hibrida antara institusi formal dan informal. Artikel ini mengkaji dinamika tersebut melalui perspektif *street-level bureaucracy* dengan menggunakan studi kualitatif di sebuah desa di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, yang memiliki karakteristik relasi sosial dan gotong royong masyarakat yang kuat. Temuan menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas administratif negara, khususnya dalam hal akurasi dan validitas sosial data bantuan sosial, mendorong birokrat tingkat jalanan melakukan strategi diskresi dalam bentuk rutinisasi dan penyederhanaan. Kondisi tersebut kemudian membentuk pengaturan tata kelola hibrida, di mana aktor informal, termasuk ketua RT/RW dan tokoh masyarakat, terlibat dalam verifikasi data serta memediasi antara regulasi negara dan kebutuhan masyarakat. Meskipun pengaturan tersebut berfungsi sebagai mekanisme penyangga jangka pendek dalam distribusi bantuan sosial, mekanisme ini juga menciptakan kondisi yang dapat memicu persepsi ketidakmerataan akses, ketergantungan personal yang cenderung membuka celah menuju pola-pola pendangkalan kewarganegaraan dan klientalistik. Penelitian ini berkontribusi terhadap kajian rezim kesejahteraan global dengan menunjukkan bahwa tata kelola kesejahteraan hibrida secara aktif diproduksi melalui implementasi pada tingkat jalanan dan mediasi informal, bukan sekadar mencerminkan koeksistensi antara institusi formal dan informal.

Keyword: Street-Level Bureaucracy, Informality, Welfare Mechanism, Brokerage

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Beyond Formal and Informal Welfare: Street-Level Bureaucracy and Hybrid Distribution in a Rural Context: Case in Kulon Progo, Yogyakarta
Ahmad Abdurrohman, Tauchid Komara Yuda, S.Sos., MDP., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

Classical welfare regime theory tends to view informal practices as secondary to formal state-based social protection. However, welfare implementation in developing countries often reveals a more hybrid relationship between formal and informal institutions. This article examines these dynamics through the lens of street-level bureaucracy using a qualitative study in a village in Kulon Progo Regency, Yogyakarta, characterised by strong social relations and traditions of mutual aid (gotong royong) that sustain informal welfare practices. Findings show that limitations in the state's administrative capacity, particularly the accuracy and social validity of social assistance data, lead street-level bureaucrats to rely on discretionary strategies in the form of routinization and simplification. Consequently, a hybrid governance arrangement emerges in which informal actors, including RT/RW leaders and community figures, participate in data verification and mediate between state regulations and community needs. While this arrangement functions as a short-term safety valve for social assistance delivery, it also creates conditions conducive to perceived inequities in access, personal dependency, and a tendency towards clientelistic practices, and the erosion of citizenship. This study contributes to global welfare regime scholarship by demonstrating that hybrid welfare governance is actively produced through street-level implementation and informal mediation rather than merely reflecting the coexistence of formal and informal institutions.

Keyword: Street-Level Bureaucracy, Informality, Welfare Mechanism, Brokerage